

BAB 6 **KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan lapangan, terdapat beberapa persoalan mendasar yang secara teoritis maupun praksis dapat disimpulkan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian. Secara umum diketahui bahwa, tidak terdapat perbedaan antara pola relasi, alasan, dan harapan petani kepada parpol. Begitu juga dengan peran birokrasi serta tokoh masyarakat dalam mempengaruhi pilihan politik petani dalam pemilu.

Petani di Ntobo dan Kumbe yang mempunyai pilihan politik yang berbeda, dalam kenyataannya memiliki persoalan sosial-politik dan struktur sosial yang sama. Pilihan pada Golkar dan PDI Perjuangan, tidak menyebabkan adanya perbedaan alasan, pola, tujuan, dan harapan petani kepada parpol. Begitu juga dengan pandangan atau sikap petani dalam merespon kebijakan yang diperjuangkan oleh Golkar atau PDI Perjuangan, petani memiliki pandangan politik yang tidak selalu sama, bahkan cenderung bertolak-belakang, seperti dalam kasus beras impor. Dengan demikian, pilihan politik petani bukan merupakan jaminan lahirnya pandangan dan sikap politik yang sama dengan parpol pilihannya.

Kesimpulan di atas, merupakan hasil perbandingan dari keseluruhan temuan lapangan di Ntobo dan Kumbe. Pada warga Ntobo dan Kumbe, terjadi proses hegemoni yang dilakukan oleh birokrasi dan tokoh masyarakat yang merupakan bagian dari strategi politik Golkar. Walaupun Kumbe dikategorikan sebagai basis PDI Perjuangan, bukan berarti petani bebas dari pengaruh birokrasi.

Hegemoni yang dipahami oleh Gramscchi sebagai superstruktural telah menjadi bingkai dari keseluruhan proses relasi yang dilakukan oleh petani dengan partai politik. Walaupun dalam kasus sogokan logistik (infrastruktur) oleh elit politik yang disampaikan melalui birokrasi atau caleg/parpol (suprastruktur), teori Gramschi tidak menyinggungnya, namun dalam konteks Ntobo dan Kumbe, terdapat beberapa masalah yang sesungguhnya justru memperkaya teori hegemoni Gramschi.

Kemudian, hal penting lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya klasifikasi antara konsepsi warga negara dan warga desa. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan diuraikan secara lebih khusus setiap hasil temuan lapangan:

6.1.1 Relasi Politik yang Tidak Seimbang

1). Pola relasi politik. Relasi yang berlangsung antara petani dan parpol di Ntobo dan Kumbe selama Pemilu 1999, 2004, dan 2009 memiliki pola yang sama. Bagi petani di Ntobo, relasi yang berlangsung pada banyak hal dimediasi oleh birokrasi dan tokoh masyarakat. Namun, dominasi Golkar, tidak membuat petani menjadi dekat dan paham dengan kebijakan Golkar. Begitu juga dengan keberadaan PDI Perjuangan di Kumbe. Petani di Kumbe melakukan relasi politiknya hanya pada saat menjelang pemilu. Selebihnya, parpol menjadi eksklusif dan menjaga jarak dengan petani.

Bagi Golkar, relasinya dengan petani disampaikan melalui pendekatan birokrasi, sementara PDI Perjuangan tidak melakukan hal ini. Namun, perbedaan pendekatan ini, tidak menyebabkan terjadinya perbedaan pola di tingkat petani. Parpol menjalankan relasi yang elitis, yang memposisikan petani sebagai kelompok marginal, yang didekati menjelang pemilu dan dengan sogokan-sogokan ekonomi. Perbedaan kepentingan politik antara petani dengan parpol menyebabkan terbentuknya pola hubungan yang tidak demokratis. Namun, keadaan ini, tidak menyebabkan petani menjauh dan alergi terhadap parpol. Petani dengan moral petaninya, masih terus melakukan permakluman atas ketidakadilan yang terjadi atas dirinya.

2). Alasan petani melakukan relasi politik. Petani mempunyai alasan sosial-ekonomi dalam melakukan relasi dengan parpol. Bagi petani di Ntobo, berhubungan dengan Golkar, di samping untuk mendapatkan bantuan logistik yang disampaikan melalui Departemen Pertanian, juga karena adanya tuntutan dalam memenangkan caleg dari Ntobo. Keadaan ini tidak berbeda jauh dengan alasan petani di Kumbe, bahwa faktor

kekeluargaan dan iming-iming kesejahteraan menjadi dorongan dalam menentukan pilihan politik dengan memilih PDI Perjuangan. dalam pemilu.

6.1.2 Hegemoni melalui Superstruktur dan Infrastruktur

1). Peran Birokrasi. Kekuatan Golkar, salah satunya terletak pada penguasaan dan peran birokrasi hingga tingkat desa. Hal inilah yang belum bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan, sehingga keberadaan Megawati sebagai *incumbent*, tidak mempengaruhi rakyat untuk menjatuhkan pilihan kepada Megawati dan PDI Perjuangan. Hal ini diperkuat dengan keberadaan PDI Perjuangan yang tidak memiliki akar sejarah politik di Bima. Berbeda dengan Partai Demokrat yang mulai melakukan hal yang sama dengan Golkar, yakni melakukan penguatan di birokrasi (suprastruktur) dan dengan memberikan bantuan-bantuan logistik kepada rakyat. Pendekatan ini, menyebabkan Partai Demokrat dapat memenangkan suara petani –terutama untuk tingkat DPR RI—di Bima, termasuk di Ntobo dan Kumbe pada Pemilu 2009.

2). Politik Kekeluargaan. Partisipasi politik petani, tidak dapat dilepaskan dari politik keluarga. Sebagai masyarakat agraris dengan nilai patriarkhal yang masih melekat cukup kuat, mempengaruhi cara pandang dan tindakan politik petani. Berbeda partai politik, bukan alasan untuk tidak dapat memilih caleg yang sama. Ikatan kekeluargaan dan peran tokoh masyarakat setempat, mempengaruhi kemenangan caleg/parpol tertentu.

3). Infrastruktur (bantuan logistik melalui birokrasi, caleg/parpol). Partisipasi politik petani melalui pemilu, dalam kenyataannya belum dapat mempengaruhi kebijakan publik. Karena keikutsertaan petani dalam pemilu, selalu diarahkan hanya pada pemenuhan kebutuhan ekonomi petani. Bagi petani, berpolitik berarti tersedianya pupuk, obat-obat padi, dan harga gabah tinggi.

Relasi petani dengan parpol, dibangun atas dasar kepentingan ekonomis. Pertukaran suara dengan benda ekonomis yang dilakukan secara langsung seperti yang dilakukan oleh caleg/parpol dalam setiap kampanye, dan dengan cara tidak langsung

yang dilakukan oleh partai *incumbent* yang dilakukan jauh sebelum pemilu, dapat mempengaruhi pilihan politik petani.

4). Partai politik tidak melakukan ideologisasi. Pada tataran yang ideal, menjadi kewajiban partai politik, dalam hal ini Golkar dan PDI Perjuangan untuk melakukan ideologisasi terhadap petani. Namun, dalam kenyataannya, partai politik hanya menjadikan petani sebagai mesin suara yang diingot dan dikunjungi menjelang pemilu. Sementara bagi petani di Ntobo dan Kumbe, pemilu dipahami sebagai *ritual politik* yang wajib untuk diikuti, dengan iming-iming terjadinya peningkatan kesejahteraan.

6.1.3 Konsepsi Warga Negara yang Bersanding dengan Warga Desa

1). Partisipasi politik sebagai warga negara (individual). Partisipasi politik petani sebagai warga negara memiliki ruang yang sama dengan kelompok warga negara lainnya. Melalui undang-undang, negara memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu. Berpartisipasi di sini, bisa berarti ikut dipilih atau memilih. Adalah hak setiap warga negara untuk ikut pemilu melalui partai politik (atau independen). Seseorang bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau eksekutif (presiden, gubernur, bupati/wali kota). Dan kalau tidak ikut mencalonkan diri, maka seseorang dapat menyalurkan aspirasi politiknya dengan ikut memilih.

Sebagai warga negara, maka petani yang berada di Ntobo maupun Kumbe, memiliki hak yang sama dalam menentukan calon pemimpinnya. Hak memilih dan dipilih ini merupakan hak individu yang dijamin oleh undang-undang. Asumsinya, seseorang yang memenuhi hak politiknya, dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki kesadaran bahwa dengan memilih, ia sedang berupaya untuk terlibat dalam proses bernegara dalam melahirkan kebijakan ekonomi-politik.

Namun, prasyarat di atas, belum dapat dijalankan oleh petani di Ntobo dan Kumbe. Karena posisinya sebagai warga negara, belum dapat diaktualisasikan sepenuhnya

dalam proses pemilu. Petani masih hidup dengan nilai-nilai yang berada di luar konsepsi warga negara. Dalam implementasi politiknya, petani memposisikan dirinya sebagai warga desa yang memiliki nilai dan aturan main yang berbeda dengan warga negara.

2). Partisipasi politik sebagai warga desa (suara kolektif). Partisipasi politik petani Ntobo dan Kumbe dalam tiga kali pemilu pasca-Reforamsi 98, menunjukkan terjadinya polarisasi bahwa, petani di Ntobo dikategorikan sebagai petani Golkar, dan petani di Kumbe sebagai petani PDI Perjuangan. Keadaan berlangsung, hingga kehadiran partai Demokrat yang berhasil merubah peta politik di Bima, khususnya Ntobo dan Kumbe.

Sebagai warga desa, maka petani di Ntobo dan Kumbe memiliki ikatan dan aturan-aturan yang berfondasikan pada nilai-nilai desa. Sebagai petani, maka kultur dan sistem nilai yang paternalistik menjadi bingkai dalam bermasyarakat. Perilaku sosial-politik masyarakat tani, memiliki kecenderungan melakukan stratifikasi sosial berdasarkan kedudukan sosial-politik seseorang. Bagi petani yang merupakan tokoh masyarakat, atau petani kaya, mempunyai posisi yang lebih tinggi dibanding petani miskin/buruh tani. Begitu juga dengan posisi petani pada umumnya, berada di lapisan lebih rendah dibandingkan elit politik; birokrasi dan tokoh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjaganya nilai-nilai paternalistik, namun bukan berarti warga kota atau warga negara lainnya, telah bebas dari nilai-nilai paternalistik.

Keadaan di atas yang menyebabkan terpolanya konsepsi warga desa, yang berpolitik berdasarkan nilai-nilai kekerabatan. Bagi petani, baik yang berada di Ntobo maupun Kumbe, mengikuti pemilu bukan merupakan hak, melainkan kewajiban (aturan lisan). Untuk itu, dalam menentukan pilihan politik, terlebih dahulu harus dibicarakan bersama antarwarga desa. Setidaknya, tokoh masyarakat dapat menentukan arah politik warga desa. Dengan mengikuti suara kolektif, maka petani mengasumsikan dirinya sebagai warga desa yang baik, yang dapat menjaga komitmen bersama. Dan petani juga memiliki potensi untuk melakukan tindakan politik lainnya –walaupun terkesan pragmatis— dalam menjaga suaranya.

Universitas Indonesia

Berhadapan dengan elit politik yang selama pemilu hanya memanfaatkan suaranya, maka petanipun memiliki posisi tawar dengan menukarkan suaranya dengan barang-barang ekonomis.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait:

6.2.1 Akademisi

Dalam hal ini, peneliti memberikan saran bagi peneliti lain yang konsen pada isu petani dan politik untuk mengembangkan penelitian pada implementasi teori warga desa yang dalam prakteknya juga mampu melakukan partisipasi politik dan tindakan-tindakan yang mengarah pada 'perlawanan'. Sehingga dapat diformulasi tesis baru yang mampu mengisi kekosongan teori Verba tentang partisipasi politik legal warga negara. Kemudian, teori hegemoni dari Gramsci yang menjadi landasan dalam menganalisa juga perlu diisi dengan adanya temuan peran infrastruktur dalam proses hegemoni. Dengan demikian, kekurangan dalam penelitian ini bisa diisi oleh peneliti lain.

Masalah lain yang perlu dikembangkan adalah posisi politik petani ketika berhadapan dengan elit politik. Dalam beberapa penelitian lain, seperti yang dijadikan studi literatur di Bab 2, telah ada upaya penelitian yang mengaitkan posisi sosial-politik petani ketika berhadapan dengan pihak lain. Namun hasil penelitian ini, belum sampai pada tindakan politik petani dalam konteks gerakan sosial.

6.2.2 Partai Politik

Sudah saatnya menempatkan petani sebagai mitra sejajar dalam berpolitik. Sepuluh tahun usia reformasi, sudah cukup memoles kekurangan sistem politik, sehingga proses pendidikan dan ideologisasi kepada petani dapat dilangsungkan. Dengan

Universitas Indonesia

memposisikan petani sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban politik yang sama dengan warga negara lainnya, maka akan memudahkan partai politik dalam merealisasikan fungsi dirinya sebagai agen ideologi. Perkembangan jaman dan meningkatnya kesadaran politik dari *civil society*, menjadi modal bagi partai politik untuk menjalankan politik yang demokratis (tidak oligarkhis), yang menyediakan kesempatan yang sama bagi petani. Dengan demikian, pemilu menjadi instrumen demokrasi yang dijalankan sebagai hak oleh setiap warga negara.

6.2.3 Petani

Melaksanakan konsep warga desa pada satu sisi dapat menjadi posisi tawar terhadap kekuatan elit politik. Akan tetapi, implementasi dari konsep warga desa, sebaiknya tidak menegasikan konsep warga negara. Karena pada banyak hal, sebagai warga negara maka petani dapat memperjuangkan hak-hak ekonomi-sosial-politiknya. Dan pada sisi lain, konsepsi warga desa memelihara kultur paternalistik yang justru berseberangan dengan nilai demokrasi. Saatnya bagi petani untuk memposisikan dirinya sebagai bagian dari kolektif sekaligus individu yang memiliki hak politik yang setara dengan warga negara lainnya, tanpa harus melakukan tindakan pragmatis, dengan memelihara pertukaran suara sebagai nilai baru.

6.2.4 Pemerintah (Birokrasi)

Birokrasi harus dikembalikan pada fungsi politiknya sebagai pelayan rakyat yang netral. Sehingga proses politik dapat berlangsung, tanpa intervensi dari pemerintah. Keadaan ini memang sulit, tetapi harus mulai dilakukan. Setidaknya apa yang dilakukan oleh Megawati dan PDI Perjuangan pada saat berkuasa, dengan tidak mencampur-adukkan peran dan fungsi birokrasi adalah hal yang patut dihargai, walaupun pilihan politik ini membawa konsekuensi tidak populernya seorang presiden/partai yang sedang berkuasa di hadapan rakyat.